



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

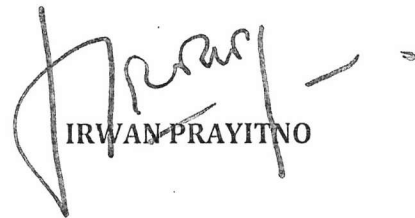
- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR: 84

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 84 TAHUN 2016

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB			
1	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan							
		1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1.1.1	Persentase peningkatan zakat, infaq dan Sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	Penerimaan tahun 2015 = Rp. 81.327.068.848	(Penerimaan zakat, infaq dan sedekah tahun ke n- Penerimaan zakat infaq dan sedekah tahun (n-1)): Penerimaan zakat tahun (n-1) x 100%	Biro Bina Sosial
				1.1.2	Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	Jumlah Jamaah haji=3.596 orang	(Jumlah jamaah haji tahun ke n- Jumlah jamaah haji tahun (n-1)): Jumlah jamaah haji (n-1) x 100%	Biro Bina Sosial
		1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1.2.1	Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA)	Konflik bernuansa SARA 2015= 0 kasus	Diukur dari Jumlah kejadian konflik dalam masyarakat yang bernuansa SARA di Sumatera Barat	Kesbangpol, Satpol
1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	1.3.1	Persentase penurunan kasus maksiat	Kasus 2015= 786	(Kasus tahun ke n- Kasus tahun (n-1)): Kasus tahun (n-1) x 100%	Satpol PP		

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Penguatan kelembagaan agama dan adat				
2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	2.1.1 Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya - MUI - KAN		Perbandingan antara jumlah KAN yang melaksanakan fungsinya sesuai hasil penilaian dari Biro Binsos dengan jumlah KAN yang telah dibentuk	Biro Bina Sosial
3	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme				
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	3.1.1 Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	85,76%	(Jumlah jabatan yang terisi sesuai kompetensi: Jumlah formasi jabatan struktural yang terisi) x 100% Dasar: dari hasil pemetaan potensi PNS	BKD
3.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	3.2.1 Perangkat Daerah Provinsi menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	0	Jumlah SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun n	Inspektorat Provinsi
4	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel				
4.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.1.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Diukur berdasarkan Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun ke n	DPKD, Inspektorat, Biro Pengelolaan Aset Daerah

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		4.1.2 Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB (70,52)	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian PAN dan RB	Biro Organisasi
		4.1.3 Indeks e-Government Provinsi	2,01	Merupakan Skor Indeks Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). Skor diterbitkan oleh Direktorat e-Govt Dirjen Aplikasi Informatika RI berdasarkan penilaian terhadap kondisi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerah di 5 Aspek: Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan	Biro Humas
		4.1.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	46,97	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat terhadap penilaian 4 Indikator yaitu: mengumumkan informasi publik (25%), menyediakan informasi publik (20%), Pelayanan informasi publik (25%) dan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik (30%)	Biro Humas
		4.1.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,23	Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan
		4.2.1 Kesesuaian prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota		Kesesuaian Jumlah Program Prioritas Provinsi dengan Kabupaten/ Kota	Bappeda
5	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif				
	5.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5.1.1 Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat UKPP pada tahun n	Biro Organisasi

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter				
6.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	6.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,98	Merupakan ukuran kualitas hidup masyarakat/penduduk (Data BPS)	Disdikbud
		6.1.2 Harapan lama sekolah		Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Data BPS)	
		6.1.3 Rata-rata lama sekolah	8,42	Lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas : jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (Data BPS)	
7	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat				
7.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	7.1.1 Persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,1	Diperoleh dengan membandingkan jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C usia 16-18 tahun dengan jumlah penduduk Sumatera Barat tahun berkenaan.	Disdikbud
		7.1.2 Angka Putus SMA	0,95	(Jumlah penduduk umur SMA yang putus sekolah : Jumlah penduduk umur SMA seluruhnya) x 100%	
		7.1.3 Angka Putus SMK	0,95	(Jumlah penduduk umur SMK yang putus sekolah : Jumlah penduduk umur SMK seluruhnya) x 100%	

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		7.1.4 Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan tinggi	41,32	Dihitung dengan membandingkan jumlah siswa tamatan SMA se Sumatera Barat tahun n yang diterima di perguruan tinggi negeri/swasta dengan jumlah siswa SMA yang lulus pada tahun n	Disdikbud
8	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak				
	8.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	8.1.1 Angka Harapan Hidup	68,32	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir (Data BPS)	Dinas Kesehatan
	8.2 Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	8.2.1 Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	2,8	Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu.	BPPr dan KB
		8.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	1,34	Tingkat Pertumbuhan penduduk pada suatu daerah (Data BPS)	BPPr dan KB
	8.3 Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	8.3.1 Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,04	Merupakan indeks pembangunan manusia berbasis gender (Data BPS)	BPPr dan KB
		8.3.2 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	67,02	Indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik (Data BPS)	

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB			
9	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	8.3.3	Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak	628	(Kasus korban kekerasan thd anak tahun ke (n-1) - Kasus korban kekerasan thd anak tahun ke n): Kasus korban kekerasan thd anak tahun (n-1) x 100%	BPPr dan KB		
		9.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	9.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,41	Pertumbuhan Ekonomi	Lintas Sektoral
				9.1.2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	34,4	PDRB perkapita tahun n	Lintas Sektoral
				9.1.3	Investasi (Rp Triliyun)	40,2	Jumlah investasi dari PMA dan PMDN pada tahun n	BKPM PPT
9.1.4	Peningkatan Nilai Ekspor			Nilai ekspor tahun 2015= US\$ 1.748 juta	Nilai ekspor tahun n - Nilai Ekspor tahun (n-1)/ Nilai Ekspor tahun (n-1) x 100%	Disperindag		
10	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	10.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	10.1.1	Skor Pola pangan harapan	84,8	Skor PPH merupakan perbandingan antara skor PPH maksimal dengan skor AKE. Jika skor AKE ≥ skor PPH maksimal maka skor PPH yang digunakan adalah skor PPH maksimal tapi jika skor AKE < Skor PPH maksimal maka skor PPH yang digunakan adalah skor AKE % AKE= (Konsumsi energi aktual (kkal/kap/hari) : 2000 kkal/kap/hr) x 100% Skor AKE = Σ (% AKE x bobot perkelompok makanan)	Badan Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
11		10.1.2 Persentase peningkatan produksi pangan a Padi b Jagung c Daging d Telur e Ikan f Kakao g Kopi h Karet	2.604.785 ton 618.833 ton 63.564 ton 78.023 ton 506.902,60 ton 84.279 ton 34.158 ton 153.245 ton	$(\text{Produksi pangan tahun } n - \text{Produksi pangan tahun } (n-1)) : \text{Produksi pangan tahun } (n-1) \times 100\%$ Dalam hal ini pangan terdiri atas; padi, jagung, cabe, daging telur, ikan kakao, kopi dan karet	Dinas Pertanian Dinas Peternakan Keswan Dinas Kelautan Dinas Perkebunan
	10.2 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	10.2.1 Nilai tukar petani	97,75	Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani	Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan
	11.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	11.1.1 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan a Wisatawan Nusantara b Wisatawan Mancanegara	6.953.678 78.274	$(\text{Jumlah wisnus/wisman tahun } n - \text{Jumlah wisnus/wisman tahun } (n-1)) : \text{Jumlah wisnus/wisman tahun } (n-1) \times 100\%$	Disparekraf

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal				
	12.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	12.1.1 Tingkat kemiskinan	6,71	Merupakan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (data BPS)	BPM
	12.2 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	12.2.1 Tingkat pengangguran terbuka	6,89	(Jumlah penganggur : Jumlah angkatan kerja) x 100%	Disnakertrans BPM
13	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah				
	13.1 Meningkatnya kualitas jalan provinsi	13.1.1 Persentase kemandapan jalan provinsi	1121,41 km	(Panjang jalan provinsi yang mantap : Panjang jalan Provinsi) x 100%	Disprasjal Tarkim
	13.2 Meningkatnya keselamatan lalu lintas	13.2.1 Rasio angka kecelakaan lalulintas		Jumlah korban yang meninggal dunia karena kecelakaan: Jumlah kendaraan yang teregistrasi) x 10.000 kendaraan	Dishub Kominfo
	13.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	13.3.1 Peningkatan rata-rata Indeks Kinerja infrastruktur irigasi provinsi	68,71	(Panjang realisasi jaringan irigasi yang dikembalikan fungsinya : Panjang rencana jaringan irigasi yang dikembalikan fungsinya)x 0,3%	Dinas PSDA
	13.4 Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	13.4.1 Rasio Elektrifikasi	83,36	(Perbandingan antara RT terlistriki (PLN dan Non PLN: Jumlah RT yang ada di Sumbar) x 100%	Dinas ESDM

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
14	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan				
14.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	14.1.1 Indeks Kualitas lingkungan Hidup	73,42	$(0,3 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,3 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,4 \times \text{Indeks Tutupan Hutan})$	Bappedalda
14.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	14.2.1 Persentase Penurunan Luas Lahan kritis	Kondisi Lahan kritis 630.695 ha	$((0,8 \times \text{Realisasi penanaman lahan kritis 5 tahun sebelumnya}) : \text{Luas Lahan Kritis}) \times 100\%$	Dinas Kehutanan
		14.2.2 Persentase penanganan kasus illegal logging	67 kasus	$(\Sigma \text{kasus illegal logging yang tertangani} : \Sigma \text{Kasus Illegal logging}) \times 100\%$	Dinas Kehutanan
		14.2.3 Persentase penurunan jumlah titik panas dari rerata angka periode tahun sebelumnya	424 titik panas	$(\Sigma \text{titik panas pada tahun (n-1)} - \Sigma \text{titik panas pada tahun n}) : \Sigma \text{titik panas pada (n-1)} \times 100\%$	Dinas Kehutanan
15	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana				
15.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	15.1.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	70%	$(\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat} : \text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}) \times 100\%$	BPBD

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO